

**PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI DAN SWASTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi  
Strata II pada Jurusan Magister Administrasi Pendidikan  
Sekolah Pascasarjana**

**Oleh:**

**APRIYANTO RUSDI EFENDI**

**Q100160199**

**MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI DAN SWASTA

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

**APRIYANTO RUSDI EFENDI**  
**Q100160199**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Dr. Suyatmini, M.Si

Pembimbing II



Dr. Sabar Narimo, M.M., M.Pd

HALAMAN PENGESAHAN

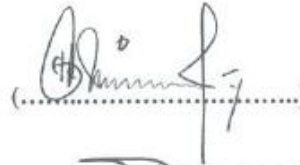
PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI DAN SWASTA

OLEH  
APRIYANTO RUSDI EFENDI  
Q100160199

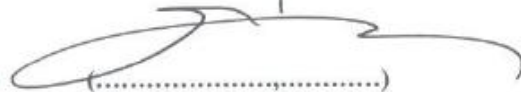
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 8 Oktober 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

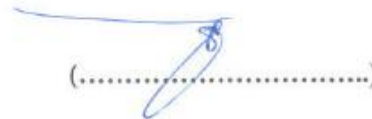
1. Dr. Suyatmini, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)

  
(.....)

2. Dr. Sabar Narimo, M.M., M.Pd  
(Anggota I Dewan Penguji)

  
(.....)

3. Dr. Djalal Fuadi, M. Pd  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)

Mengetahui  
Direktur,





  
Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M. Pd.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 September 2018

Penulis  
  
  
**Aprivanto Rusdi Efendi**  
NIM. Q100160199

## **PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI DAN SWASTA**

### **Abstrak**

Pendidikan tidak bisa lepas dari biaya. Untuk itulah Biaya Operasional Pendidikan (BOS) sebagai solusi dari pemerintah dalam mengatasi biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Pengelolaan BOS yang baik sangat diperlukan dalam segi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, dalam pengelolaan BOS dirasa belum optimal ada beberapa kendala yang dihadapi SMP Negeri dan swasta misalnya keterlambatan dana BOS yang menyebabkan masalah yang cukup besar bagi proses belajar mengajar di sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri dan Swasta serta mengetahui kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya dari pengelolaan BOS. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan desain etnografi yaitu mendokumentasikan atau mempotret kehidupan individu dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) pengelolaan BOS diawali dengan pembentukan Tim BOS dan penyusunan RKAS (2) pelaksanaan BOS SMP Negeri dan Swasta berdasarkan juknis BOS yang terbaru (3) terdapat perbedaan untuk gaji guru dan Karyawan Non PNS di SMP Negeri dan Swasta yakni maksimal 15% untuk SMP Negeri dan maksimal 50 % untuk SMP Swasta dari total penerimaan BOS dalam 1 tahun (4) pelaporan BOS dengan dua cara yaitu online dan menyusun LPJ tiap triwulan (5) ada beberapa permasalahan BOS di SMP Negeri yaitu (a) juknis BOS yang tiap tahun berganti (b) kegiatan yang mendadak dan tidak masuk di dalam RKAS (c) BOS terlambat cair (d) format LPJ yang diminta berbeda, sedangkan permasalahan BOS di SMP Swasta yaitu (a) Juknis BOS tiap tahun ganti (b) BOS terlambat cair (c) kekurangan sumber daya manusia khusus dalam pengelolaan BOS.

**Kata kunci :** pengelolaan, bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah menengah pertama (SMP)

### **Abstract**

Education can be separated from the costs. Education cost is more expensive than before, to solve it the government gives school operational assistance (BOS) as solution to solve cost of education. A good BOS Management is needed in preparation scope, implementation scope and report scope. But, management of BOS is not optimal, there are some problems that must government Public school and private junior high school face, for example : the postpone of BOS's payment , it causes some big problems for teaching-learning process in school. The purpose of this research is to know the goverment public school and private junior high schools of management BOS'S cost also the obstacle that faced and the solution of BOS management. This research uses qualitative descriptive research, and use ethnography design as approach, it means that it documentates of potrays the individual's life in daily activities by observing and interview them with relevant people. The researcher uses interview, observe and documentation to collect the data. The result of this research conclude that (1) management BOS started with making BOS'S Team to arrange of RKAS (2) implementation of BOS in

government and preparatory junior high school is based on new rule (3) the difference of teacher's salary between non civil service teacher and non civil service staff , they are 15% for government junior high school and 50% for preparatory junior high school from amount of BOS's cost in a year. (4) There are two ways to report it, they are online and arrange LPJ every three month. (5) there are some BOS's problems in government junior high school, such as (a) BOS'S rule always change every year (b) the sudden activities don't belong to RKAS (c) BOS is late to be chased (d) LPJ's format ask different from others, meanwhile there are some BOS'S problem in preparatory junior high school , such as (a) BOS'S rule is always change every year (b) late of sending BOS'S cost (c) lack of human resources especially in managing BOS.

**Keywords :** management, school operational assistance (BOS), junior high school (SMP)

## 1. PENDAHULUAN

Di era sekarang tak ada yang gratis. Semua serba mahal. Tak kecuali dengan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala masyarakat untuk menyekolahkan putra/putrinya sampai level yang tinggi. Disini pemerintah hadir untuk menjawab masalah tersebut. Pendidikan sangat tergantung kepada manajemen tata kelola yang ada di dalam sekolah. Negara hadir dalam program yang bernama Bantuan Operasional Sekolah sebagai jawaban membantu semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dari level pendidikan dasar sampai pendidikan menengah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah. Setiap sekolah di Negara Indonesia mendapatkan Bantuan Operasioanal Sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menggratiskan biaya sekolah yang terus mengalami kenaikan.

BOS yang merupakan program dari pemerintah pusat tentunya membutuhkan manajemen dalam pengelolaanya. Mulai dari manajemen penganggaran, manajemen penggunaanya serta manajenen pelaporan. Manajemen tersebut di buat dari hulu ke hilir. Mulai dari tingkat pusat maupun tingkat bawahnya sampai ke sekolah yang merupakan penerima anggaran. Dari tingkat pusat sebelum BOS dicairkan terlebih dahulu pemerintah pusat mengeluarkan juknis BOS sebagai bahan acuan sekolah dalam mengelola BOS. Didalam juknis tersebut terdapat item-item yang terinci sedemikian rupa apa saja yang dapat dan

tidak dapat dibiayai oleh BOS. Sekolah tinggal melaksanakan apa yang ada di dalam juknis tersebut.

Di dalam juknis juga terdapat jadwal pencairan anggaran dari pusat ke sekolah. Mulai dari triwulan pertama sampai ke triwulan ke empat. Masing-masing triwulan dengan angka yang berbeda-beda tergantung kegiatan apa saja yang ada di triwulan tersebut. Sekolah tinggal melaksanakan apa yang sudah tersedia di juknis BOS. Sistem pelaporan BOS juga sudah terdapat di dalam juknis BOS tersebut. Contoh pelaporan untuk dinas pendidikan, untuk direktorat maupun BPK. Baik itu pelaporan *online* maupun pelaporan *off line*.

Juknis BOS dibuat oleh pemerintah pusat tiap tahun berganti dimaksudkan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola BOS mulai dari perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan penggunaan anggaran maupun pelaporan penggunaan anggaran. Akan tetapi segala hal yang dilakukan pemerintah dalam memudahkan manajemen BOS disekolah belum semuanya dapat mengatasi kendala penggunaan dan pelaporan BOS di sekolah. Banyak sekali kendala di lapangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah yang luput dari perhatian pemerintah.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain etnografi. Menurut Fraenkel & Wallen yang dikutip oleh Sunarso (2017:29) dilakukan penekanan pada “*documneting or portraying the everyday experiences of individuals by observing and interviewing them ana relavant others.*” Fokus penekanan pendekatan etnografi adalah mendokumentasikan atau mempotret kehidupan individu dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang relevan. Sedangkan menurut Suryani yang dikutip oleh Widyatmoko (2017:38-39) menyatakan bahwa etnografi menyediakan kesempatan yang lebih dalam mengumpulkan data yang lengkap dan relevan dalam menjawab permasalahan kerana etnografi mempunyai sifat mendalam dan partisipan.

Pada penelitian ini digunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur, atau sering juga disebut

sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, serta wawancara terbuka kepada narasumber. Observasi yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dokumentasi yaitu menggali informasi atau pengetahuan yang ada hubungannya dengan penelitian melalui dokumentasi kegiatan. Kepustakaan yaitu mencari atau menggali informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini melalui sumber-sumber ilmiah seperti buku-buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan sekolah gratis dan berbayar serta implementasinya. Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan Kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

Dalam merencanakan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri baik itu SMP Negeri 1 Kedawung maupun SMP Negeri 2 Kedawung diawali dengan pembentukan tim BOS tingkat sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan Komite. Tim BOS tingkat sekolah tersebut kemudian menyusun RKAS dengan sebelumnya meminta masukan dari guru mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada satu tahun beserta dengan pembiayaannya. Penyusunan RKAS didasarkan kepada skala prioritas yang harus segera di adakan dan dilaksanakan. Kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana BOS adalah yang ada di dalam RKAS tersebut. Kegiatan lain diluar RKAS tidak dapat dibiayai oleh dana BOS kecuali ada revisi RKAS. Rincian kegiatan yang disusun di dalam RKAS harus disertai dengan rencana biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan kepada RKAS yang di buat oleh tim BOS tingkat sekolah. Dana BOS yang ada di sekolah negeri adalah satu-satunya sumber dana yang ada di SMP Negeri. Semua operasional sekolah yang menggunakan anggaran semua menggunakan dana BOS termasuk untuk gaji guru tidak tetrap dan gaji karyawan tidak tetap (non PNS). Besaran gaji untuk guru dan karyawan non PNS di SMP Negeri sangatlah kecil, berkisar antara enam ribu



rupiah sampai sepuluh ribu rupiah per jam. Hal itu dikarenakan juknis BOS untuk gaji SMP Negeri tidak boleh lebih dari 15 % dari total pemasukan dana BOS dalam satu tahun.

Dalam hal pelaporan dana BOS di SMP Negeri sangatlah ketat. SMP Negeri harus membuat pelaporan untuk 2 lembaga yaitu untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan untuk Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Kedua lembaga tersebut meminta SMP Negeri untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS. Rincian penggunaan anggaran yang di LPJ BOS harus sama persis dengan nota/kwitansi penggunaan anggaran. Setiap triwulan sekolah diwajibkan untuk menyusun LPJ yang di diminta oleh Dinas Pendidikan.Kabupaten Sragen. Selain Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen juga dari BPKD yang datang memeriksa proses pengelolaan BOS.

Selain dari itu, pelaporan BOS di SMP Negeri juga melalui *online* yakni dengan memasukan rincian penggunaan anggaran (form K7a) ke dalam portal online yang bernama BOS Online. Bendahara BOS dapat bekerja sama dengan operator sekolah untuk memasukan pelaporan BOS online. Operator Sekolah merupakan guru/karyawan yang diberi tugas khusus untuk mengerjakan Dapodik sekolah dan segala aplikasi turunan dapodik seperti *vervalpd*, *vervalptk*, *padamunegeri*, *simpatika* dan BOS Online.

Perencanaan pengelolaan BOS di SMP Swasta berlanjut dengan pembuatan RKAS. Sebelum pembuatan RKAS Tim BOS meminta masukan dari dewan guru kegiatan dan sarana prasarana apa yang diusulkan untuk dimasukan di dalam RKAS. Sebagai contoh usulan dari guru olahraga menginginkan 2 bola voli untuk pembelajaran bola voli disekolah dikarenakan bola voli di sekolah sudah tidak layak pakai. Contoh lain dari guru IPA menginginkan teleskop untuk pembelajaran IPA disekolah. Usulan-usulan dari guru kemudian dihimpun untuk dibawa kedalam rapat penyusunan RKAS. Di dalam penyusunan RKAS di SMP Swasta pada bagian pemasukan terdiri dari 2 item yakni pemasukan dari dana BOS dan pemasukan dari iuran orang tua siswa.

Tahap pelaksanaan pengelolaan BOS di SMP Swasta didasarkan kepada kepada juknis BOS yang diterima sekolah. Di dalam juknis BOS untuk SMP

Swasta di sebutkan dana BOS disekolah swasta diperbolehkan untuk gaji guru dan yayasan maksimal 50% dari total dana BOS yang di terima sekolah dalam satu tahun. Oleh karenanya gaji guru dan karyawan di sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan dengan gaji guru dan karyawan non PNS di sekolah negeri. Pembiayaan lain selain untuk gaji guru juga sudah ada didalam juknis BOS. Pengalokasian dana BOS disekolah di dasarkan kepada 8 standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara lain (1) standart isi, (2) standart proses, (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (4) standart sarana dan prasarana, (5) standart pembiayaan, (6) standart pembiayaan, (7) standar penilaian, dan (8) standar lulusan.

Kedelapan standart tersebut kemudian dipecah lagi menjadi beberapa kegiatan antara lain pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembiayaan hpnpratum guru dan karyawan, pengembangan profesi guru, pembiayaan pengelolaan sekolah, dan pembelian seta perawatan komputer sekolah.

Permasalahan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri dirasa cukup banyak. Permasalahan ini sedikit-banyak dapat menghambat dalam pembiayaan sekolah. Masalah-masalah ini akan juga menimbulkan masalah baru dalam sekolah apabila tidak segera di carikan solusinya. Masalah pertama yang dialami SMP Negeri dalam mengelola BOS adalah Juknis BOS yang berganti setiap tahunnya membuat sekolah harus menunggu juknis BOS yang terbaru sebelum mengelola BOS. Lebih dari itu apabila juknis BOS yang sudah di diterbitkan direvisi oleh Pemerintah. Hal ini membuat sekolah harus bekerja dua kali menyesuaikan revisi juknis BOS terbaru.

Masalah kedua adalah kegiatan yang harus di ikuti oleh sekolah yang mendadak dan tidak ada di dalam RKAS. Kegiatan lomba yang dibiayai oleh BOS haruslah masuk di dalam RKAS. Kegiatan lain yang tidak masuk di dalam RKAS tidak dapat dibiayai oleh BOS. Apabila ada kegiatan yang informasinya mendadak atau kegiatan yang sudah lama tidak ada kemudian muncul lagi mengharuskan sekolah mencari solusi dalam pembiayaanya. Disisi lain SMP Negeri dilarang

untuk menarik iuran apapun ke orang tua siswa. Solusi dari masalah ini dengan mengalihkan pembiayaan lain yang dirasa tidak begitu mendesak pengadaanya. Sebagai contoh kegiatan lomba PMR yang sudah lama tidak ada kemudian tahun 2017 akhir muncul lagi. Sementara sekolah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Maka Kepala Sekolah mengalihkan pembiayaan yang semula untuk pengadaan LCD digunakan dulu untuk mengikuti lomba PMR.

Permasalahan ketiga SMP Negeri dalam mengelola dana BOS adalah keterlambatan cair. BOS seharusnya cair sebelum digunakan atau paling tidak diawal bulan akan tetapi kenyataanya dana BOS cair diakhir triwulan. Bahkan pernah pada tahun 2017 BOS terlambat cair selama 4 bulan. Hal ini membuat sekolah kesulitan dalam mengelola dana. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan meminjam uang di koperasi sekolah. Koperasi sekolah negeri yang maju dan besar memungkinkan sekolah meminjam sejumlah dana untuk menutup keterlambatan pencairan BOS. Pinjaman dana dari koperasi kemudian dimanfaatkan untuk operasional sekolah dan gaji guru dan karyawan non PNS.

Masalah keempat yang dialami oleh sekolah negeri dalam mengelola dana BOS adalah format LPJ BOS yang berbeda. LPJ yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berbeda dengan LPJ yang diminta oleh BPKD. Hal ini membuat bendahara harus mebuat 2 LPJ dengan format yang berbeda. Tiap triwulan Bendahara BOS sekolah diwajibkan untuk mengumpulkan LPJ ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Sementara itu satu tahun sekali BPKD memeriksa pelaksanaan BOS ke sekolah negeri dan meminta sekolah menyusun LPJ. Solusi dari masalah ini dengan melaksanakan pelatihan membuat LPJ BOS yang di inisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Dengan adanya pelatihan membuat LPJ BOS diharapkan ada kesepahaman dan satu kata antara Dinas Pendidikan, bendahara BOS sekolah maupun BPKD.

Permasalahan yang dihadapi SMP Swasta dalam mengelola dana BOS terdapat beberapa persamaan dengan SMP Negeri. SMP swasta mendapatkan kendala juga apabila juknis BOS yang berganti setiap tahunya. Kendala itu dikarenakan sekolah harus menunggu juknis yang terbaru. Masalah kedua juga sama dengan masalah yang ada di sekolah negeri yakni BOS terlambat cair.

Masalah ini sering sekali terjadi. Biaya BOS yang seharusnya di cairkan pada awal bulan dalam kenyataannya cair di akhir bulan. Tak jarang pula BOS cair pada triwulan berikutnya. Padahal BOS diharapkan untuk mendanai operasional sekolah dan gaji guru serta karyawan. Akibatnya perasional sekolah menjadi terhambat. Gaji guru dan karyawan juga terlambat. Solusi yang dilaksanakan oleh SMP Swasta di kedawung dengan meminjam kepada pihak ketiga.

### **3.2 Pembahasan**

SMP Negeri di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen sepenuhnya menggunakan dana BOS dalam mengelola pembiayaan sekolah. Hal ini seperti hasil penelitian dari Oketch (2016) yang mendeskripsikan model pendidikan gratis di Negara sub-Saharan Africa. Pengelolaan BOS di SMP Negeri Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen diawali dengan tahap perencanaan yaitu dengan pembentukan panitia BOS yang di pimpin oleh Kepala Sekolah. Kemudian panitia BOS yang telah dibentuk bertugas menyusun RKAS. Seperti halnya yang disampaikan oleh Widyatmoko (2017) perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah. RKAS yang telah disusun tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan BOS dalam satu tahun. Didalam RKAS terdapat rincian pembiayaan yang akan dilaksanakan sekolah dalam satu tahun didasarkan kepada 8 standar pendidikan. Antara lain standar isi, proses, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. (Latief, 2015)

Kedelapan standart tersebut dirinci dengan menyertakan masing-masing kegiatan dan rencana pembiayaanya. Tim BOS sebelumnya meminta dewan guru untuk mengusulkan perenanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Pengusulan dapat berupa alat peraga pembelajaran, sarana prasarana, maupun kegiatan ekstrakurikuler/perlombaan yang akan diikuti dalam satu tahun beserta rencana biaya. Didalam rapat RKAS akan diputuskan apakah usulan dari guru dapat di kabulkan atau tidak. Asas pemanfaatan harus juga digunakan agar dana BOS teepat guna. Tim BOS dalam mengakomodasi usulan dari guru melakukan analisis dan mengidentifikasi dalam perbaikan serta pemanfaatan

sumber daya yang ada agar lebih efektif dan tepat guna (Wong, 2016). Setelah dana BOS pada triwulan tersebut cair sekolah melaksanakan kegiatan pembiayaan yang ada di RKAS sesuai dengan jadwal yang dibuat.

Pemanfaatan BOS di SMP Negeri harapanya mampu mengatasi masalah keuangan yang dialami masyarakat. Meskipun hasil penelitian Sundarasen (2016) menyatakan literasi keuangan, sosialisasi keuangan dan norma orang tua mempunyai peranan penting dalam pengelolaan keuangan anak tetapi pengelolaan BOS di sektor pelaksanaan juga sangat penting. Disisi lain hasil dari penelitian Nampalii (2017) menyimpulkan bahwa keuangan mikro dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pendidikan anak dan telah menjadi alat yang efektif untuk memerangi kemiskinan. SMP Negeri hanya diperkenankan maksimal 15 % menggunakan dana BOS untuk gaji guru dan karyawan non PNS. Hal ini sesuai dengan juknis BOS tahun 2017 dan 2018. Selain untuk gaji guru dan karyawan BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah dan meningkatkan mutu sekolah. Menurut Sumarni (2017) efektifitas dana BOS dipandang dari segi persiapan, pengelolaan dan evaluasinya mempengaruhi peningkatan mutu sekolah.

SMP Swasta di Kecamatan Kedawung Kabupeten Sragen diberi keleluasaan untuk menarik iuran dari orang tua siswa selain dana BOS. hal ini disebabkan sekolah swasta dalam mengelola keuangan sekolah bukan cuma melulu masalah pencapaian akademik saja akan tetapi juga mementingkan proses, motifasi dan rencana sampingan dalam keuangan. Poyton (2015) berpendapat perisiapan pengelolaan keuangan erat kaitanya dengan pencapaian akademik mereka, motivasi, kepastian, dan tujuan dan rencana sampingan siswa. Pengelolaan BOS di sekolah swasta tidak begitu jauh perbedaanya dengan sekolah negeri. Dimulai dengan pembentukan tim BOS yang terdiri dari berbagai elemen sekolah dan masyarakat. Komite sebagai perwakilan dari masyarakat berfungsi sebagai pengawas dalam pengelolaan BOS serta memberi masukan kepada sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelola pendidikan harus terus dilakan untuk melangsungan sekolah ke arah yang lebih baik. Bukan hanya kersasama dalam mengelola BOS saja akan tetapi kerjasama yang baik harus di bangun antara sekolah dan masyarakat di semua sektor (Antoninis, 2015). Perencanaan BOS erat

kairanya dengan perencanaan akademik sekolah. Didalam perencanaan akademik di sekolah terdapat perencanaan keuangan yang akan dilaksanakan sekolah tersebut. Selain itu perencanaan akademik sekolah terdapat pula cara yang akan dilaksanakan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Semua itu terdapat pada Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Pendek.

Perbedaan signifikan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen terdapat dalam nominal yang digunakan untuk gaji guru dan karyawan non PNS. Di SMP Negeri dalam menggaji guru dan karyawan non PNS diambilkan dari dana BOS maksimal hanya 15 % dari total dana yang diterima dalam satu tahun sedangkan untuk SMP Swasta di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen berdasarkan juknis BOS tahun 2017 dan 2018 diperbolehkan menggaji guru dan karyawan non PNS maksimal 50 % dari dana BOS yang di terima dalam satu tahun. Hal ini berakibat sangat besarnya perbedaan antara jumlah gaji yang di terima oleh guru dan karyawan non PNS di SMP Negeri dengan SMP Swasta. Gaji guru dan karyawan sangatlah berpengaruh dengan kualitas lembaga pendidikan. Woessmann (2016) berpendapat bahwa kualitas lembaga pendidikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi siswa.

Pengelolaan BOS di pengelolaan BOS di SMP Swasta juga di dasarkan kepada juknis BOS yang sebelumnya di buat oleh sekolah. Juknis tersebut sebagai acuan dalam membuat RKAS, pelaksanaan pembiayaan serta penyusunan LPJ BOS di setiap triwulan. Dalam penyusunan laporan haruslah sesuai dengan fakta pengeluaran yang ada. Tiap item pengeluaran dana BOS di laporkan dalam LPJ BOS yang nantinya akan dikumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Masalah dan Solusi yang Timbul dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.

Ketiga karena keterlambatan pencairan BOS sehingga berakibat fatal kepada SMP Negeri di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dikarenakan sekolah negeri hanya mencukupkan diri menggunakan dana BOS dalam pendanaan sekolah. Sekolah diharuskan mencari dana talangan ke koperasi sekolah untuk

mentup keterlambatan BOS. Keempat pada tahap pelaporan BOS seringkali pembuatan LPJ antara yang diminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah berbeda. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, sekolah dengan BPKD. Hal ini menunjukkan ketiga belah pihak belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang selaras dalam pengelolaan BOS meskipun akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen mengundang bendahara dalam pelatihan membuat LPJ BOS.

Keempat permasalahan diatas menandakan belum efektifnya penggunaan manajemen BOS yang sudah berjalan. Penggunaan manajemen pendidikan yang baik dalam mengelola BOS diharapkan mampu menguraikan perspektif yang berbeda untuk integrasi yang baik di dunia pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Gubarkov, (2017) bahwa penggunaan prinsip-prinsip baru manajemen organisasi pendidikan pendidikan tinggi di bidang keuangan dan ekonomi dapat menguraikan perspektif untuk integrasi lebih lanjut ke dunia pendidikan dan ekonomi.

#### **4. PENUTUP**

Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Perencanaan Pengelolaan BOS SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung dengan membentuk tim BOS dan penyusunan RKAS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk Kepala Sekolah, dan Komite. Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan BOS SMP Negeri di Kecamatan Kedawung mengacu kepada juknis BOS yang diterbitkan oleh pemerintah. Pembiayaan pendidikan yang dapat ditanggung oleh dana BOS sudah terdapat didi dalam juknis BOS. Pada juknis BOS disebutkan untuk gaji guru dan karyawan non PNS di SMP Negeri maksimal hanya 15 % dari total peneriaan dana BOS yang diterima sekolah. Pada tahap pelaporan pengelolaan BOS SMP dengan dua cara. Cara pertama dengan online yakni dengan memasukan rincian pengeluaran BOS ke dalam portal online yang bernama BOS Online. Cara kedua dengan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS pada akhir triwulan.

Pengelolaan BOS di SMP Swasta juga dimulai dengan membentuk tim BOS dan penyusunan RKAS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk Kepala Sekolah, dan Komite. Perbedaan perencanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung yaitu sumber dana. Sumber dana di SMP Negeri Kecamatan Kedawung hanya dari dana BOS saja. Maka dari itu pembuatan RKAS di SMP Negeri dalam kolom pemasukan hanya tersebut dana BOS. Sedangkan SMP Swasta di Kecamatan Kedawung diperbolehkan untuk menarik iuran dari orang tua siswa. Dalam pembuatan RKAS di SMP Swasta dalam kolom pemasukan ditulis dari BOS dan dari BOP. Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan BOS SMP Swasta di Kecamatan Kedawung juga mengacu kepada juknis BOS yang diterbitkan oleh pemerintah. Pembiayaan pendidikan yang dapat ditanggung oleh dana BOS sudah terdapat didalam juknis BOS. Gaji guru dan karyawan non PNS maksimal 50 % dari total penerimaan dana BOS dalam 1 tahun. Pada tahap pelaporan Pengelolaan BOS SMP Swasta di Kecamatan Kedawung hampir sama yakni dengan dua cara. Cara pertama dengan online yakni dengan online dan offline (penyusunan LPJ).

Perbedaan yang signifikan antara pelaporan pelaporan Pengelolaan BOS SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung terdapat pada instansi yang meminta LPJ BOS. Instansi yang meminta LPJ BOS SMP Negeri Kecamatan kedawung yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah sedangkan instansi yang meminta LPJ BOS di SMP Swasta hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen saja.

Masalah yang dihadapi dalam mengelola BOS SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung juga hampir sama yakni (1) juknis BOS yang tiap tahun berganti sehingga sekolah harus menunggu juknis BOS terbaru. (2) Keterlambatan pencairan dana BOS membuat SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kedawung dalam mengelola pembiayaan sekolah menjadi terkendala sehingga sekolah harus mencari pinjaman kepada pihak ketiga untuk menutup kekurangan dana tersebut. Masalah lain yang dihadapi SMP Negeri Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam mengelola BOS yakni (1) kegiatan tidak ada di RKAS yang mewajibkan SMP Negeri Kecamatan Kedawung untuk mengikuti. Hal ini



membuat membuat SMP Negeri harus mengalihkan pembiayaan lain membiayai kegiatan tersebut.(2) format LPJ bos yang berbeda antara yang diminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dengan BPKD. Solusi dari masalah ini dengan melaksanakan pelatihan bersama yang di inisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Masalah lain yang dihadapi SMP Swasta Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam mengelola BOS adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus yang mengelola dana BOS. Semua Bendahara BOS di SMP Swasta adalah guru yang mengajar 24 jam sehingga harus membagi waktu antara mengajar dan menjadi Bendahara. Solusi yang dijalankan SMP Swasta untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam mengelola dana BOS yaitu Kepala Sekolah mengangkat salah satu guru/karyawan yang ada di sekolah untuk membantu dalam menyusun SPJ BOS.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antoninis, M. (2015). *Development partnerships in education*. (). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1714457872?accountid=34598>
- Chin, J. M., & Chuang, C. (2015). The relationships among school-based budgeting, innovative management, and school effectiveness: A Studi on specialist schools in taiwan. *The Asia - Pacific Education Researcher*, 24(4), 679-693. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s40299-014-0220-3
- Demange, G., Fenge, R., & Uebelmesser, S. (2015). Quality of education and the number of students: A general-equilibrium analysis. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 171(3), 456-477. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1705720737?accountid=34598>
- financial and budgetary mechanism for the functioning of educational institutions of higher education in the conditions of innovative economy development in the russian federation. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 8(4), 1113-1125. doi:http://dx.doi.org/10.14505/jarle.v8.4(26).09
- Hariswati, Nurul. "Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6.1 (2015): 75-88.

- Idris, Ridwan. "APBN Pendidikan dan Mahalnya Biaya Pendidikan." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 13.1 (2010): 92-110.
- Ipate, D. M., Pârvu, I., & Sandu, C. F. (2017). Comparative Studi Regarding Higher Education Financing Ssystems. *Economics, Management and Financial Markets*, 12(2), 182-190. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1918794062?accountid=34598>
- Karacic, D., Miskulin, I., & Serdarusic, H. (2016). State Investment In Science And Scientific Productivity of. *UTMS Journal of Economics*, 7(1), 37-48. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1799374589?accountid=34598>
- Latief, Abd Majid, and Jamil Latief. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama." *Utilitas* 1.1 (2015): 35-42.
- Lin, Z. H. U. (2017). "Innovation Research on Cost Accounting of the Private University Education under Big Data Background-Taking a Private University in Zhengzhou as an Example." *DEStech Transactions on Economics, Business and Management* eced
- Muryati, Irene. "Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4.2 (2016): 237-246.
- Nampalli, S., & Sarma, V. V. S. (2017). Impact of micro finance on child education – A Studi of select SHGs. *BVIMSR's Journal of Management Research*, 9(2), 99-104. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1961322408?accountid=34598>
- Ngaba, Anggriati Ledu. (2017) "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah." *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 2.2
- Oketch, M. (2016). Financing higher education in sub-saharan africa: Some reflections and implications for sustainable development. *Higher Education*, 72(4), 525-539. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10734-016-0044-6
- Phillips, C. R., & Olson, J. E. (2015). To what extent are the final cost objectives of universities subsidized? *Review of Business*, 36(1), 113-129. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1732272511?accountid=34598>
- Poynton, T. A., Lapan, R. T., & Marcotte, A. M. (2015). Financial planning strategies of high school seniors: Removing barriers to career success. *The Career Development Quarterly*, 63(1), 57-73. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1662078749?accountid=34598>

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS 2018

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS 2017

Soendari, Tjutju. "Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif." *Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPI. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980)* (2001).

Sumarni, Sumarni. (2017). "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 12.1.

Sunarso, (2017). *Pengelolaan Supervisi Akademik Pengawas Satuan Pendidikan di SD Negeri Madyotaman Kecamatan Banjarsari*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sutama, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairuz Media

Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Widyatmoko, Subkhi. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemas I Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Woessmann, L. (2016). The importance of school Systems: Evidence from international differences in student achievement. *The Journal of Economic Perspectives*, 30(3), 3-32. <http://dx.doi.org/10.1257/jep.30.3.3>

Wong, P., Ng, P. M., L., Mak, C. K., Y., Chan, J. K., & Y. (2016). Students' choice of sub-degree programmes in self-financing higher education institutions in hongkong. *Higher Education*, 71(4), 455-472. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10734-015-9915-5>

Yin, Robert K. "Studi kasus: desain dan metode." *Raja Grafindo Persada. Jakarta* (2002).

Zarandi, H. P. (2017). The pathology of the quality of educational services in payam-e- noor university of karaj. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 988-997. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1964555075?accountid=34598>

Zinurova, R. I., Berman, S. S., Tuzikov, A. R., Gayazova, E. B., Stayzhkina, E. I., Medvedeva, V. R., & Frolova, I. A. (2016). The management of russian universities on the basis of international education quality standards. *International Review of Management and Marketing*, 6(2)